



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dananya belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);

28. Peraturan...

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

35. Peraturan...

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 37);
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);

47. Peraturan...

47. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 32);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 33);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 34);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 3);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

54. Peraturan...

54. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 10);
57. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 75);
58. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 60);
59. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

MEMUTUSKAN:...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	200.506.376.287,27
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.261.415.794.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	<u>437.188.471.365,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.899.110.641.652,27

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	788.575.703.830,83
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	1.183.163.800,00
4) Belanja Hibah	Rp.	71.389.098.600,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	4.105.377.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	5.117.840.465,58
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	330.007.251.200,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>2.618.302.300,00</u>
	Rp.	1.202.996.737.196,41
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	41.289.050.620,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	551.885.836.217,21
3) Belanja Modal	Rp.	<u>243.898.982.628,89</u>
	Rp.	837.073.869.466,10
Jumlah Belanja	Rp.	2.040.070.606.662,51
Surplus/ (Defisit) Anggaran	(Rp.)	140.959.965.010,24

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	140.959.965.010,24
b. Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	140.959.965.010,24

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

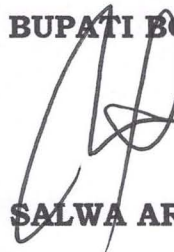
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 52



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	2.056.329.006.939,95	1.899.110.641.652,27	(157.218.365.287,68)	(7,65)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	232.926.089.574,95	200.506.376.287,27	(32.419.713.287,68)	(13,92)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	40.657.044.433,89	28.805.788.441,29	(11.851.255.992,60)	(29,15)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.444.905.975,00	22.372.616.214,50	(6.072.289.760,50)	(21,35)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.977.527.552,77	3.977.527.552,77	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	159.846.611.613,29	145.350.444.078,71	(14.496.167.534,58)	(9,07)
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.431.791.004.000,00	1.261.415.794.000,00	(170.375.210.000,00)	(11,90)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.684.271.000,00	74.787.690.000,00	(4.896.581.000,00)	(6,14)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	956.016.610.000,00	862.433.102.000,00	(93.583.508.000,00)	(9,79)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	396.090.123.000,00	324.195.002.000,00	(71.895.121.000,00)	(18,15)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	391.611.913.365,00	437.188.471.365,00	45.576.558.000,00	11,64
1.3.1	Pendapatan Hibah	60.950.000.000,00	62.070.400.000,00	1.120.400.000,00	1,84
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	83.107.160.365,00	83.107.160.365,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	247.554.753.000,00	256.120.568.000,00	8.565.815.000,00	3,46
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	35.890.343.000,00	35.890.343.000,00	0,00
2	BELANJA	2.197.288.971.950,19	2.040.070.606.662,51	(157.218.365.287,68)	(7,16)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.253.412.878.142,59	1.202.996.737.196,41	(50.416.140.946,18)	(4,02)
2.1.1	Belanja Pegawai	807.083.642.101,70	788.575.703.830,83	(18.507.938.270,87)	(2,29)
2.1.3	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	73.259.198.600,00	71.389.098.600,00	(1.870.100.000,00)	(2,55)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.983.600.000,00	4.105.377.000,00	1.121.777.000,00	37,60
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.910.195.040,89	5.117.840.465,58	(1.792.354.575,31)	(25,94)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	359.893.078.600,00	330.007.251.200,00	(29.885.827.400,00)	(8,30)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.100.000.000,00	2.618.302.300,00	518.302.300,00	24,68
2.2	BELANJA LANGSUNG	943.876.093.807,60	837.073.869.466,10	(106.802.224.341,50)	(11,32)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.1	Belanja Pegawai	38.903.399.820,00	41.289.050.620,00	2.385.650.800,00	6,13
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	609.314.344.139,71	551.885.836.217,21	(57.428.507.922,50)	(9,43)
2.2.3	Belanja Modal	295.658.349.847,89	243.898.982.628,89	(51.759.367.219,00)	(17,51)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(140.959.965.010,24)	(140.959.965.010,24)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BONDOWOSO, 24 JULI 2020

BUPATI BONDOWOSO



SALWA ARIFIN



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	2.056.329.006.939,95	1.899.110.641.652,27	(157.218.365.287,68)	(7,65)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	232.926.089.574,95	200.506.376.287,27	(32.419.713.287,68)	(13,92)	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	40.657.044.433,89	28.805.788.441,29	(11.851.255.992,60)	(29,15)	
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.434.962.541,00	723.993.020,50	(710.969.520,50)	(49,55)	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1.434.962.541,00	723.993.020,50	(710.969.520,50)	(49,55)	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019
4.1.1.02	Pajak Restoran	2.861.896.475,19	1.430.948.237,59	(1.430.948.237,60)	(50,00)	
4.1.1.02.01	Restoran	2.861.896.475,19	1.430.948.237,59	(1.430.948.237,60)	(50,00)	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019
4.1.1.03	Pajak Hiburan	57.739.513,20	26.380.500,00	(31.359.013,20)	(54,31)	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	40.140.500,00	16.700.000,00	(23.440.500,00)	(58,40)	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	17.599.013,20	9.680.500,00	(7.918.513,20)	(44,99)	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.001.619.000,00	906.334.126,50	(95.284.873,50)	(9,51)	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.001.619.000,00	906.334.126,50	(95.284.873,50)	(9,51)	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	13.800.000.000,00	12.256.176.189,40	(1.543.823.810,60)	(11,19)	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.800.000.000,00	12.256.176.189,40	(1.543.823.810,60)	(11,19)	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	48.500.000,00	21.769.530,00	(26.730.470,00)	(55,11)	
4.1.1.06.08	Pasir	48.500.000,00	21.769.530,00	(26.730.470,00)	(55,11)	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019
4.1.1.07	Pajak Parkir	145.156.565,50	128.167.600,00	(16.988.965,50)	(11,70)	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	145.156.565,50	128.167.600,00	(16.988.965,50)	(11,70)	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	167.170.339,00	117.019.237,30	(50.151.101,70)	(30,00)	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	167.170.339,00	117.019.237,30	(50.151.101,70)	(30,00)	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.890.000.000,00	7.945.000.000,00	(7.945.000.000,00)	(50,00)	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	15.890.000.000,00	7.945.000.000,00	(7.945.000.000,00)	(50,00)	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.444.905.975,00	22.372.616.214,50	(6.072.289.760,50)	(21,35)	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	27.044.306.252,00	21.279.944.414,50	(5.764.361.837,50)	(21,31)	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	21.434.948.402,00	16.919.518.000,00	(4.515.430.402,00)	(21,07)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	224.249.600,00	91.199.840,00	(133.049.760,00)	(59,33)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	3.784.076.000,00	3.299.715.000,00	(484.361.000,00)	(12,80)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	614.380.000,00	186.289.200,00	(428.090.800,00)	(69,68)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	115.480.000,00	108.304.087,50	(7.175.912,50)	(6,21)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	335.558.000,00	262.908.787,00	(72.649.213,00)	(21,65)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	2.259.000,00	1.506.000,00	(753.000,00)	(33,33)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	16.653.750,00	11.102.500,00	(5.551.250,00)	(33,33)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	810.000,00	540.000,00	(270.000,00)	(33,33)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	249.377.250,00	166.251.500,00	(83.125.750,00)	(33,33)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	101.714.250,00	67.809.500,00	(33.904.750,00)	(33,33)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	164.800.000,00	164.800.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.142.239.723,00	842.671.800,00	(299.567.923,00)	(26,23)	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	106.518.000,00	312.400.000,00	205.882.000,00	193,28	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	76.324.973,00	55.000.000,00	(21.324.973,00)	(27,94)	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	17.450.000,00	7.450.000,00	(10.000.000,00)	(57,31)	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	77.064.750,00	54.395.000,00	(22.669.750,00)	(29,42)	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	303.844.000,00	161.821.800,00	(142.022.200,00)	(46,74)	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	370.973.000,00	89.540.000,00	(281.433.000,00)	(75,86)	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	22.300.000,00	12.800.000,00	(9.500.000,00)	(42,60)	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan (RPH)	55.040.000,00	55.040.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.2.02.32	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan	91.725.000,00	91.725.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	258.360.000,00	250.000.000,00	(8.360.000,00)	(3,24)	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	258.000.000,00	250.000.000,00	(8.000.000,00)	(3,10)	Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.977.527.552,77	3.977.527.552,77	0,00	0,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.977.527.552,77	3.977.527.552,77	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BPD Jatim	3.977.527.552,77	3.977.527.552,77	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asii Daerah yang Sah	159.846.611.613,29	145.350.444.078,71	(14.496.167.534,58)	(9,07)	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	267.515.000,00	236.415.000,00	(31.100.000,00)	(11,63)	
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	158.810.000,00	158.810.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	58.605.000,00	52.605.000,00	(6.000.000,00)	(10,24)	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	50.100.000,00	25.000.000,00	(25.100.000,00)	(50,10)	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati No. 188.45/09/430.42/2011
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	15.000.000.000,00	7.000.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(53,33)	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	15.000.000.000,00	7.000.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(53,33)	Peraturan Bupati No. 188.45/01/430.6.2/2012
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	72.148.372,02	72.148.372,02	0,00	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	0,00	71.314.372,02	71.314.372,02	0,00	
4.1.4.04.02	Kerugian Barang	0,00	834.000,00	834.000,00	0,00	
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	19.071.760,00	19.071.760,00	0,00	
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	19.071.760,00	19.071.760,00	0,00	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	5.894.585,00	5.894.585,00	0,00	
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	5.894.585,00	5.894.585,00	0,00	
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	82.700.000,00	4.300.000,00	(78.400.000,00)	(94,80)	
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	82.700.000,00	4.300.000,00	(78.400.000,00)	(94,80)	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	99.174.000.000,00	99.174.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	99.174.000.000,00	99.174.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	49.008.113,29	1.575.000,00	(47.433.113,29)	(96,79)	
4.1.4.17.01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	49.008.113,29	1.575.000,00	(47.433.113,29)	(96,79)	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	12.910.161,69	12.910.161,69	0,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	12.910.161,69	12.910.161,69	0,00	
4.1.4.18.02	Penutupan Rekening Tabungan DAK Fisik Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	44.273.388.500,00	37.824.129.200,00	(6.449.259.300,00)	(14,57)	
4.1.4.22.01	Dana Kapitasi JKN FKTP Nangkaan	1.581.905.052,00	1.209.175.000,00	(372.730.052,00)	(23,56)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.02	Dana Kapitasi JKN FKTP Kotakulon	685.669.901,00	591.832.000,00	(93.837.901,00)	(13,69)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.03	Dana Kapitasi JKN FKTP Kademangan	734.177.551,00	708.180.000,00	(25.997.551,00)	(3,54)	Permenkes No. 19 Th. 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.4.22.04	Dana Kapitasi JKN FKTP Tenggarang	2.060.362.436,00	1.844.709.600,00	(215.652.836,00)	(10,47)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.05	Dana Kapitasi JKN FKTP Tegallampel	1.120.470.399,00	1.070.216.400,00	(50.253.999,00)	(4,49)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.06	Dana Kapitasi JKN FKTP Taman Krocok	793.582.151,00	593.566.000,00	(200.016.151,00)	(25,20)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.07	Dana Kapitasi JKN FKTP Wringin	2.322.156.572,00	1.898.947.200,00	(423.209.372,00)	(18,22)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.08	Dana Kapitasi JKN FKTP Pakem	1.508.801.921,00	1.401.314.400,00	(107.487.521,00)	(7,12)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.09	Dana Kapitasi JKN FKTP Curahdami	1.747.488.093,00	1.626.956.400,00	(120.531.693,00)	(6,90)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.10	Dana Kapitasi JKN FKTP Binakal	1.263.552.949,00	1.076.036.400,00	(187.516.549,00)	(14,84)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.11	Dana Kapitasi JKN FKTP Grujugan	2.407.192.134,00	2.199.486.000,00	(207.706.134,00)	(8,63)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.12	Dana Kapitasi JKN FKTP Maesan	2.545.082.263,00	2.376.399.600,00	(168.682.663,00)	(6,63)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.13	Dana Kapitasi JKN FKTP Tamanan	2.551.145.719,00	2.301.530.400,00	(249.615.319,00)	(9,78)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.14	Dana Kapitasi JKN FKTP Jambesari	2.323.445.103,00	1.797.100.800,00	(526.344.303,00)	(22,65)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.15	Dana Kapitasi JKN FKTP Pujer	2.481.308.970,00	2.291.106.000,00	(190.202.970,00)	(7,67)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.16	Dana Kapitasi JKN FKTP Tlogosari	3.175.467.709,00	2.314.002.000,00	(861.465.709,00)	(27,13)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.17	Dana Kapitasi JKN FKTP Wonosari	2.261.526.515,00	1.966.094.400,00	(295.432.115,00)	(13,06)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.18	Dana Kapitasi JKN FKTP Tapen	1.737.643.894,00	1.230.994.200,00	(506.649.694,00)	(29,16)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.19	Dana Kapitasi JKN FKTP Sukosari	983.108.899,00	719.381.000,00	(263.727.899,00)	(26,83)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.20	Dana Kapitasi JKN FKTP Sumber Wringin	2.011.748.910,00	1.525.217.000,00	(486.531.910,00)	(24,18)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.21	Dana Kapitasi JKN FKTP Klabang	756.505.337,00	726.366.000,00	(30.139.337,00)	(3,98)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.22	Dana Kapitasi JKN FKTP Sempol	1.106.189.677,00	1.109.278.000,00	3.088.323,00	0,28	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.23	Dana Kapitasi JKN FKTP Prajekan	1.391.099.535,00	1.252.197.600,00	(138.901.935,00)	(9,99)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.24	Dana Kapitasi JKN FKTP Botolinggo	1.756.229.983,00	1.387.750.800,00	(368.479.183,00)	(20,98)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.1.4.22.25	Dana Kapitasi JKN FKTP Cermee	2.967.526.827,00	2.606.292.000,00	(361.234.827,00)	(12,17)	Permenkes No. 19 Th. 2014
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.431.791.004.000,00	1.261.415.794.000,00	(170.375.210.000,00)	(11,90)	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.684.271.000,00	74.787.690.000,00	(4.896.581.000,00)	(6,14)	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	48.286.310.000,00	54.395.858.000,00	6.109.548.000,00	12,65	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.759.126.000,00	4.415.027.000,00	(1.344.099.000,00)	(23,34)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	12.113.081.000,00	14.177.955.000,00	2.064.874.000,00	17,05	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	1.372.392.000,00	1.135.544.000,00	(236.848.000,00)	(17,26)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	1.526.940.000,00	1.537.811.000,00	10.871.000,00	0,71	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	27.514.771.000,00	33.129.521.000,00	5.614.750.000,00	20,41	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	31.397.961.000,00	20.391.832.000,00	(11.006.129.000,00)	(35,05)	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	423.652.000,00	514.970.000,00	91.318.000,00	21,55	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	333.605.000,00	315.387.000,00	(18.218.000,00)	(5,46)	Perpres No 72 Tahun 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	1.418.361.000,00	915.571.000,00	182,10	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	26.517.933.000,00	16.122.415.000,00	(10.395.518.000,00)	(39,20)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	3.402.181.000,00	1.750.250.000,00	(1.651.931.000,00)	(48,56)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	217.800.000,00	270.449.000,00	52.649.000,00	24,17	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.2	Dana Alokasi Umum	956.016.610.000,00	862.433.102.000,00	(93.583.508.000,00)	(9,79)	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	956.016.610.000,00	862.433.102.000,00	(93.583.508.000,00)	(9,79)	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	956.016.610.000,00	862.433.102.000,00	(93.583.508.000,00)	(9,79)	Perpres No 78 Tahun 2019; Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	396.090.123.000,00	324.195.002.000,00	(71.895.121.000,00)	(18,15)	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	108.218.004.000,00	72.222.372.000,00	(35.995.632.000,00)	(33,26)	
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	31.085.752.000,00	31.085.752.000,00	0,00	0,00	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	31.750.405.000,00	0,00	(31.750.405.000,00)	(100,00)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	4.929.902.000,00	749.902.000,00	(4.180.000.000,00)	(84,79)	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.168.000.000,00	1.168.000.000,00	0,00	0,00	Perpres No 78 Tahun 2019
4.2.3.01.19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.373.294.000,00	3.373.294.000,00	0,00	0,00	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.3.01.20	DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar	3.664.746.000,00	3.664.746.000,00	0,00	0,00	Perpres No 78 Tahun 2019
4.2.3.01.21	DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan	29.095.847.000,00	29.095.847.000,00	0,00	0,00	Perpres No 78 Tahun 2019
4.2.3.01.23	DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Farmasi	3.084.831.000,00	3.084.831.000,00	0,00	0,00	Perpres No 78 Tahun 2019
4.2.3.01.31	DAK Bidang Sosial	65.227.000,00	0,00	(65.227.000,00)	(100,00)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi	28.453.227.000,00	21.023.091.000,00	(7.430.136.000,00)	(26,11)	
4.2.3.05.01	DAK Afirmasi Bidang Infrastruktur Air Minum	3.880.000.000,00	0,00	(3.880.000.000,00)	(100,00)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.05.02	DAK Afirmasi Bidang Infrastruktur Sanitasi	6.160.000.000,00	2.968.000.000,00	(3.192.000.000,00)	(51,82)	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.3.05.05	DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan	4.398.136.000,00	4.040.000.000,00	(358.136.000,00)	(8,14)	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.3.05.07	DAK Afirmasi Bidang Pendidikan	2.530.000.000,00	2.530.000.000,00	0,00	0,00	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.05.08	DAK Afirmasi Bidang Kesehatan	11.485.091.000,00	11.485.091.000,00	0,00	0,00	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	220.258.277.000,00	211.391.236.000,00	(8.867.041.000,00)	(4,03)	
4.2.3.06.01	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	23.904.000.000,00	22.644.000.000,00	(1.260.000.000,00)	(5,27)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.06.02	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	19.751.830.000,00	25.661.830.000,00	5.910.000.000,00	29,92	Perpres No 78 Tahun 2019; Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.3.06.03	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	4.031.166.000,00	4.031.166.000,00	0,00	0,00	Perpres No 78 Tahun 2019
4.2.3.06.04	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	6.308.302.000,00	6.241.832.000,00	(66.470.000,00)	(1,05)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.06.05	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	136.911.562.000,00	126.090.299.000,00	(10.821.263.000,00)	(7,90)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.06.06	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.154.000.000,00	814.388.000,00	(1.339.612.000,00)	(62,19)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.06.09	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	2.831.161.000,00	2.831.161.000,00	0,00	0,00	Perpres No 78 Tahun 2019
4.2.3.06.10	DAK Non Fisik Data Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.065.903.000,00	2.913.461.000,00	(152.442.000,00)	(4,97)	PMK No 35 Tahun 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.3.06.12	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	19.868.500.000,00	19.172.200.000,00	(696.300.000,00)	(3,50)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.06.13	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	491.010.000,00	491.010.000,00	0,00	0,00	Perpres No 78 Tahun 2019
4.2.3.06.14	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata	885.004.000,00	444.050.000,00	(440.954.000,00)	(49,83)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.06.15	DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000,00	55.839.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.07	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	39.160.615.000,00	19.558.303.000,00	(19.602.312.000,00)	(50,06)	
4.2.3.07.01	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	4.120.000.000,00	1.720.000.000,00	(2.400.000.000,00)	(58,25)	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.3.07.02	DAK Penugasan Bidang Jalan	12.795.814.000,00	0,00	(12.795.814.000,00)	(100,00)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.07.03	DAK Penugasan Bidang Pasar	2.850.382.000,00	0,00	(2.850.382.000,00)	(100,00)	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.07.04	DAK Penugasan Bidang Irigasi	4.674.605.000,00	4.674.605.000,00	0,00	0,00	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.3.07.05	DAK Penugasan Bidang Air Minum	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.3.07.07	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	7.842.384.000,00	7.842.384.000,00	0,00	0,00	PMK No 35 Tahun 2020
4.2.3.07.08	DAK Penugasan Bidang Pertanian	3.176.937.000,00	2.305.607.000,00	(871.330.000,00)	(27,43)	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.3.07.09	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.363.962.000,00	1.164.962.000,00	(199.000.000,00)	(14,59)	Perpres No 72 Tahun 2020
4.2.3.07.10	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	1.586.531.000,00	1.100.745.000,00	(485.786.000,00)	(30,62)	Perpres No 72 Tahun 2020
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	391.611.913.365,00	437.188.471.365,00	45.576.558.000,00	11,64	
4.3.1	Pendapatan Hibah	60.950.000.000,00	62.070.400.000,00	1.120.400.000,00	1,84	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	60.950.000.000,00	62.070.400.000,00	1.120.400.000,00	1,84	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	60.950.000.000,00	62.070.400.000,00	1.120.400.000,00	1,84	KEPMEN DIKBUD No 231/P/2020 tgl 10 Februari 2020
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	83.107.160.365,00	83.107.160.365,00	0,00	0,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	83.107.160.365,00	83.107.160.365,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.275.619.737,00	20.275.619.737,00	0,00	0,00	Surat Gubernur No. 970/6594/202.4/2019
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.061.989.474,00	10.061.989.474,00	0,00	0,00	Surat Gubernur No. 970/6594/202.4/2019
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.170.605.503,00	20.170.605.503,00	0,00	0,00	Surat Gubernur No. 970/6594/202.4/2019
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	258.234.649,00	258.234.649,00	0,00	0,00	Surat Gubernur No. 970/6594/202.4/2019
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	32.340.711.002,00	32.340.711.002,00	0,00	0,00	Surat Gubernur No. 970/6594/202.4/2019
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	247.554.753.000,00	256.120.568.000,00	8.565.815.000,00	3,46	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	247.554.753.000,00	256.120.568.000,00	8.565.815.000,00	3,46	
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	9.079.082.000,00	19.903.560.000,00	10.824.478.000,00	119,22	Perpres No 78 Tahun 2019; Perpres No 72 Tahun 2020
4.3.4.01.06	Dana Desa	238.475.671.000,00	236.217.008.000,00	(2.258.663.000,00)	(0,95)	Perpres No 78 Tahun 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	35.890.343.000,00	35.890.343.000,00	0,00	Surat Gubernur Nomor 045.2/7660/201.4/2019 Surat Gubernur Nomor 903/24.787/201.5/2019 Surat Gubernur Nomor 903/8215.10/101.1/2019 Surat Gubernur Nomor 412.2/258/112.3/2020
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	35.890.343.000,00	35.890.343.000,00	0,00	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	35.890.343.000,00	35.890.343.000,00	0,00	
5	BELANJA	2.197.288.971.950,19	2.040.070.606.662,51	(157.218.365.287,68)	(7,16)	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.253.412.878.142,59	1.202.996.737.196,41	(50.416.140.946,18)	(4,02)	
5.1.1	Belanja Pegawai	807.083.642.101,70	788.575.703.830,83	(18.507.938.270,87)	(2,29)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	550.743.795.050,00	550.869.179.150,00	125.384.100,00	0,02	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	434.974.355.800,00	433.642.754.800,00	(1.331.601.000,00)	(0,31)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	39.382.411.400,00	39.397.411.400,00	15.000.000,00	0,04	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	8.192.861.750,00	8.236.261.750,00	43.400.000,00	0,53	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	25.365.650.900,00	25.413.157.900,00	47.507.000,00	0,19	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	8.035.685.700,00	8.079.994.200,00	44.308.500,00	0,55	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	22.655.770.300,00	22.655.770.300,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	823.984.500,00	2.130.458.800,00	1.306.474.300,00	158,56	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.127.800,00	6.423.100,00	295.300,00	4,82	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	110.750.000,00	110.750.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	28.626.100,00	28.626.100,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	56.165.700,00	56.165.700,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	28.626.100,00	28.626.100,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	105.966.000,00	105.966.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	425.300.000,00	425.300.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Legislasi 2)	19.548.900,00	19.548.900,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.22	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	44.550.000,00	44.550.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.23	Tunjangan Transportasi	4.674.000.000,00	4.674.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.24	Tunjangan Reses	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	220.921.255.100,00	199.844.226.788,13	(21.077.028.311,87)	(9,54)	
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	297.000.000,00	0,00	(297.000.000,00)	(100,00)	
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	79.998.693.100,00	71.379.539.788,13	(8.619.153.311,87)	(10,77)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.02.08	Tunjangan Profesi Guru	136.911.562.000,00	126.090.299.000,00	(10.821.263.000,00)	(7,90)	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Guru	2.154.000.000,00	814.388.000,00	(1.339.612.000,00)	(62,19)	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.070.000.000,00	6.070.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	169.500.979,00	0,00	(169.500.979,00)	(100,00)	
5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB	169.500.979,00	0,00	(169.500.979,00)	(100,00)	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.845.038.250,00	1.459.729.850,00	(385.308.400,00)	(20,88)	
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	299.144.039,00	36.199.650,00	(262.944.389,00)	(87,90)	
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	128.906.500,00	71.547.400,00	(57.359.100,00)	(44,50)	
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	2.362.400,00	1.632.600,00	(729.800,00)	(30,89)	
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	50.832.000,00	45.316.700,00	(5.515.300,00)	(10,85)	
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	685.878.800,00	628.247.000,00	(57.631.800,00)	(8,40)	
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	4.220.000,00	6.578.250,00	2.358.250,00	55,88	
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	6.853.000,00	6.352.450,00	(500.550,00)	(7,30)	
5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	508.800,00	1.355.800,00	847.000,00	166,47	
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	608.333.690,00	400.000.000,00	(208.333.690,00)	(34,25)	
5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	57.999.021,00	262.500.000,00	204.500.979,00	352,59	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	110.671.830,00	75.183.450,00	(35.488.380,00)	(32,07)	
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	18.920.580,00	4.560.000,00	(14.360.580,00)	(75,90)	
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	48.145.000,00	32.954.200,00	(15.190.800,00)	(31,55)	
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	2.700.000,00	1.500.000,00	(1.200.000,00)	(44,44)	
5.1.1.06.17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	18.604.600,00	8.091.000,00	(10.513.600,00)	(56,51)	
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	2.290.000,00	2.752.000,00	462.000,00	20,17	
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	7.950.000,00	12.500.000,00	4.550.000,00	57,23	
5.1.1.06.34	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Kesehatan Hewan	3.821.650,00	4.586.250,00	764.600,00	20,01	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.07	Biaya Iuran Asuransi Kesehatan	23.006.288.292,70	26.035.291.992,70	3.029.003.700,00	13,17	
5.1.1.07.01	Biaya Iuran Asuransi Kesehatan	23.006.288.292,70	26.035.291.992,70	3.029.003.700,00	13,17	
5.1.1.08	Biaya Jaminan Kecelakaan Kerja	1.054.073.800,00	1.059.073.800,00	5.000.000,00	0,47	
5.1.1.08.01	Biaya Jaminan Kecelakaan Kerja	1.054.073.800,00	1.059.073.800,00	5.000.000,00	0,47	
5.1.1.09	Biaya Jaminan Kematian	3.163.018.800,00	3.163.018.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.09.01	Biaya Jaminan Kematian	3.163.018.800,00	3.163.018.800,00	0,00	0,00	
5.1.3	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00	
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00	
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00	
5.1.4	Belanja Hibah	73.259.198.600,00	71.389.098.600,00	(1.870.100.000,00)	(2,55)	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	73.259.198.600,00	71.389.098.600,00	(1.870.100.000,00)	(2,55)	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	73.259.198.600,00	71.389.098.600,00	(1.870.100.000,00)	(2,55)	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.983.600.000,00	4.105.377.000,00	1.121.777.000,00	37,60	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	505.100.000,00	1.651.877.000,00	1.146.777.000,00	227,04	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada	505.100.000,00	1.651.877.000,00	1.146.777.000,00	227,04	
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Masyarakat	2.392.000.000,00	2.367.000.000,00	(25.000.000,00)	(1,05)	
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga	2.392.000.000,00	2.367.000.000,00	(25.000.000,00)	(1,05)	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.910.195.040,89	5.117.840.465,58	(1.792.354.575,31)	(25,94)	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.065.704.443,39	2.880.578.844,13	(1.185.125.599,26)	(29,15)	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.065.704.443,39	2.880.578.844,13	(1.185.125.599,26)	(29,15)	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.844.490.597,50	2.237.261.621,45	(607.228.976,05)	(21,35)	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.844.490.597,50	2.237.261.621,45	(607.228.976,05)	(21,35)	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	359.893.078.600,00	330.007.251.200,00	(29.885.827.400,00)	(8,30)	
5.1.7.07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	121.417.407.600,00	93.790.243.200,00	(27.627.164.400,00)	(22,75)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.07.01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	121.417.407.600,00	93.790.243.200,00	(27.627.164.400,00)	(22,75)	
5.1.7.08	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	238.475.671.000,00	236.217.008.000,00	(2.258.663.000,00)	(0,95)	
5.1.7.08.01	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	238.475.671.000,00	236.217.008.000,00	(2.258.663.000,00)	(0,95)	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.100.000.000,00	2.618.302.300,00	518.302.300,00	24,68	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	2.100.000.000,00	2.618.302.300,00	518.302.300,00	24,68	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.100.000.000,00	2.618.302.300,00	518.302.300,00	24,68	
5.2	BELANJA LANGSUNG	943.876.093.807,60	837.073.869.466,10	(106.802.224.341,50)	(11,32)	
5.2.1	Belanja Pegawai	38.903.399.820,00	41.289.050.620,00	2.385.650.800,00	6,13	
5.2.1.01	Honorarium PNS	18.882.065.700,00	18.570.258.200,00	(311.807.500,00)	(1,65)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.572.745.700,00	18.009.933.200,00	(562.812.500,00)	(3,03)	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	295.600.000,00	256.355.000,00	(39.245.000,00)	(13,28)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	13.720.000,00	303.970.000,00	290.250.000,00	2.115,52	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.330.799.620,00	13.931.584.004,00	(4.399.215.616,00)	(24,00)	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.330.799.620,00	13.931.584.004,00	(4.399.215.616,00)	(24,00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	1.690.534.500,00	1.549.592.800,00	(140.941.700,00)	(8,34)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.628.262.500,00	1.487.320.800,00	(140.941.700,00)	(8,66)	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	62.272.000,00	62.272.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	0,00	7.237.615.616,00	7.237.615.616,00	0,00	
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	0,00	7.237.615.616,00	7.237.615.616,00	0,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	609.314.344.139,71	551.885.836.217,21	(57.428.507.922,50)	(9,43)	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.437.113.474,12	37.912.561.979,92	11.475.448.505,80	43,41	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.621.437.550,00	8.247.865.900,00	(1.373.571.650,00)	(14,28)	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.822.551.650,00	1.675.637.250,00	(146.914.400,00)	(8,06)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	197.819.500,00	174.467.450,00	(23.352.050,00)	(11,80)	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.144.370.600,00	1.485.679.100,00	341.308.500,00	29,82	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.798.601.852,00	5.753.873.027,00	(1.044.728.825,00)	(15,37)	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	62.860.000,00	37.860.000,00	(25.000.000,00)	(39,77)	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	51.630.000,00	51.630.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	6.737.842.322,12	20.485.549.252,92	13.747.706.930,80	204,04	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.220.950.355,00	15.247.478.044,00	(973.472.311,00)	(6,00)	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.949.546.000,00	2.780.605.100,00	(168.940.900,00)	(5,73)	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	242.596.000,00	134.021.000,00	(108.575.000,00)	(44,76)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	65.050.000,00	65.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.704.921.754,00	6.542.949.673,00	(161.972.081,00)	(2,42)	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.928.963.901,00	2.808.242.271,00	(120.721.630,00)	(4,12)	
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	31.981.200,00	9.086.300,00	(22.894.900,00)	(71,59)	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Peralatan/Perlengkapan Pelatihan	661.894.300,00	914.507.500,00	252.613.200,00	38,17	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Peralatan Modal Kerja	199.022.200,00	184.787.200,00	(14.235.000,00)	(7,15)	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan Jalan	1.158.500.000,00	1.158.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Makanan	718.209.000,00	523.469.000,00	(194.740.000,00)	(27,11)	
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Percontohan	560.266.000,00	126.260.000,00	(434.006.000,00)	(77,46)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.022.723.506,09	59.154.127.415,29	(3.868.596.090,80)	(6,14)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.094.930.000,00	1.016.535.347,00	(78.394.653,00)	(7,16)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	534.542.000,00	491.130.000,00	(43.412.000,00)	(8,12)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20.557.842.550,00	20.720.397.450,00	162.554.900,00	0,79	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.776.937.000,00	1.572.882.000,00	(204.055.000,00)	(11,48)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.753.982.800,00	3.739.658.500,00	(14.324.300,00)	(0,38)	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	98.580.000,00	85.170.000,00	(13.410.000,00)	(13,60)	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	425.810.000,00	136.860.000,00	(288.950.000,00)	(67,86)	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.12	Belanja TV Berlangganan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Medis	34.337.944.714,09	31.001.763.130,29	(3.336.181.583,80)	(9,72)	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pemeriksaan/Pengujian Sampel	413.714.442,00	388.290.988,00	(25.423.454,00)	(6,15)	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	21.234.233.784,00	21.217.355.268,00	(16.878.516,00)	(0,08)	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	21.159.233.784,00	21.217.355.268,00	58.121.484,00	0,27	
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.117.428.247,00	5.413.762.372,00	(703.665.875,00)	(11,50)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.274.560.197,00	1.109.807.097,00	(164.753.100,00)	(12,93)	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.266.725.350,00	2.818.697.575,00	(448.027.775,00)	(13,71)	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	897.619.400,00	784.234.400,00	(113.385.000,00)	(12,63)	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	7.048.000,00	7.048.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	127.900.000,00	157.900.000,00	30.000.000,00	23,46	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	479.225.300,00	479.225.300,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.09	Belanja Pengecatan Kendaraan	64.350.000,00	56.850.000,00	(7.500.000,00)	(11,66)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.096.838.460,00	9.860.926.510,00	(3.235.911.950,00)	(24,71)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.195.943.460,00	6.896.763.760,00	(2.299.179.700,00)	(25,00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.900.895.000,00	2.964.162.750,00	(936.732.250,00)	(24,01)	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.288.450.000,00	670.425.000,00	(618.025.000,00)	(47,97)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.600.000,00	413.000.000,00	(387.600.000,00)	(48,41)	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	477.850.000,00	257.425.000,00	(220.425.000,00)	(46,13)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.270.559.004,00	623.720.604,00	(646.838.400,00)	(50,91)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.270.559.004,00	623.720.604,00	(646.838.400,00)	(50,91)	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.737.469.400,00	3.677.752.800,00	(1.059.716.600,00)	(22,37)	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	465.749.000,00	395.402.500,00	(70.346.500,00)	(15,10)	
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	422.500.000,00	422.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	6.300.000,00	1.500.000,00	(4.800.000,00)	(76,19)	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	550.471.400,00	361.923.800,00	(188.547.600,00)	(34,25)	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	930.300.000,00	645.550.000,00	(284.750.000,00)	(30,61)	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	230.745.000,00	92.200.000,00	(138.545.000,00)	(60,04)	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Jaringan Satelit Telekomunikasi	784.000.000,00	713.375.000,00	(70.625.000,00)	(9,01)	
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Sound System	718.150.000,00	521.800.000,00	(196.350.000,00)	(27,34)	
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Alat Ukur	70.000.000,00	62.200.000,00	(7.800.000,00)	(11,14)	
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Lampu	123.050.000,00	45.000.000,00	(78.050.000,00)	(63,43)	
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Pelatihan	26.700.000,00	21.387.500,00	(5.312.500,00)	(19,90)	
5.2.2.10.14	Belanja Sewa Karpet/Tikar/Terpal	215.640.000,00	211.050.000,00	(4.590.000,00)	(2,13)	
5.2.2.10.15	Belanja Sewa Alat Pendingin	193.864.000,00	183.864.000,00	(10.000.000,00)	(5,16)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.570.407.656,00	24.473.921.056,00	(9.096.486.600,00)	(27,10)	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	232.358.000,00	1.085.738.000,00	853.380.000,00	367,27	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.237.579.500,00	18.829.481.400,00	(9.408.098.100,00)	(33,32)	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.411.703.500,00	1.390.975.000,00	(20.728.500,00)	(1,47)	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan	1.350.751.500,00	829.711.500,00	(521.040.000,00)	(38,57)	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pasien	2.338.015.156,00	2.338.015.156,00	0,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	665.250.000,00	444.750.000,00	(220.500.000,00)	(33,15)	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	216.750.000,00	216.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	147.750.000,00	26.250.000,00	(121.500.000,00)	(82,23)	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	243.750.000,00	144.750.000,00	(99.000.000,00)	(40,62)	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	979.839.000,00	783.829.000,00	(196.010.000,00)	(20,00)	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	979.839.000,00	783.829.000,00	(196.010.000,00)	(20,00)	
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	1.826.199.400,00	864.719.600,00	(961.479.800,00)	(52,65)	
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	97.000.000,00	115.000.000,00	18.000.000,00	18,56	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	65.050.000,00	65.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.704.921.754,00	6.542.949.673,00	(161.972.081,00)	(2,42)	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.928.963.901,00	2.808.242.271,00	(120.721.630,00)	(4,12)	
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	31.981.200,00	9.086.300,00	(22.894.900,00)	(71,59)	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Peralatan/Perlengkapan Pelatihan	661.894.300,00	914.507.500,00	252.613.200,00	38,17	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Peralatan Modal Kerja	199.022.200,00	184.787.200,00	(14.235.000,00)	(7,15)	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan Jalan	1.158.500.000,00	1.158.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Makanan	718.209.000,00	523.469.000,00	(194.740.000,00)	(27,11)	
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Percontohan	560.266.000,00	126.260.000,00	(434.006.000,00)	(77,46)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.022.723.506,09	59.154.127.415,29	(3.868.596.090,80)	(6,14)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.094.930.000,00	1.016.535.347,00	(78.394.653,00)	(7,16)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	534.542.000,00	491.130.000,00	(43.412.000,00)	(8,12)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20.557.842.550,00	20.720.397.450,00	162.554.900,00	0,79	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.776.937.000,00	1.572.882.000,00	(204.055.000,00)	(11,48)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.753.982.800,00	3.739.658.500,00	(14.324.300,00)	(0,38)	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	98.580.000,00	85.170.000,00	(13.410.000,00)	(13,60)	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	425.810.000,00	136.860.000,00	(288.950.000,00)	(67,86)	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.12	Belanja TV Berlangganan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Medis	34.337.944.714,09	31.001.763.130,29	(3.336.181.583,80)	(9,72)	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pemeriksaan/Pengujian Sampel	413.714.442,00	388.290.988,00	(25.423.454,00)	(6,15)	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	21.234.233.784,00	21.217.355.268,00	(16.878.516,00)	(0,08)	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	21.159.233.784,00	21.217.355.268,00	58.121.484,00	0,27	
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.117.428.247,00	5.413.762.372,00	(703.665.875,00)	(11,50)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.274.560.197,00	1.109.807.097,00	(164.753.100,00)	(12,93)	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.266.725.350,00	2.818.697.575,00	(448.027.775,00)	(13,71)	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	897.619.400,00	784.234.400,00	(113.385.000,00)	(12,63)	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	7.048.000,00	7.048.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	127.900.000,00	157.900.000,00	30.000.000,00	23,46	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	479.225.300,00	479.225.300,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.09	Belanja Pengecatan Kendaraan	64.350.000,00	56.850.000,00	(7.500.000,00)	(11,66)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.096.838.460,00	9.860.926.510,00	(3.235.911.950,00)	(24,71)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.195.943.460,00	6.896.763.760,00	(2.299.179.700,00)	(25,00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.900.895.000,00	2.964.162.750,00	(936.732.250,00)	(24,01)	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.288.450.000,00	670.425.000,00	(618.025.000,00)	(47,97)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.600.000,00	413.000.000,00	(387.600.000,00)	(48,41)	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	477.850.000,00	257.425.000,00	(220.425.000,00)	(46,13)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.270.559.004,00	623.720.604,00	(646.838.400,00)	(50,91)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.270.559.004,00	623.720.604,00	(646.838.400,00)	(50,91)	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.737.469.400,00	3.677.752.800,00	(1.059.716.600,00)	(22,37)	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	465.749.000,00	395.402.500,00	(70.346.500,00)	(15,10)	
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	422.500.000,00	422.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	6.300.000,00	1.500.000,00	(4.800.000,00)	(76,19)	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	550.471.400,00	361.923.800,00	(188.547.600,00)	(34,25)	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	930.300.000,00	645.550.000,00	(284.750.000,00)	(30,61)	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	230.745.000,00	92.200.000,00	(138.545.000,00)	(60,04)	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Jaringan Satelit Telekomunikasi	784.000.000,00	713.375.000,00	(70.625.000,00)	(9,01)	
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Sound System	718.150.000,00	521.800.000,00	(196.350.000,00)	(27,34)	
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Alat Ukur	70.000.000,00	62.200.000,00	(7.800.000,00)	(11,14)	
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Lampu	123.050.000,00	45.000.000,00	(78.050.000,00)	(63,43)	
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Pelatihan	26.700.000,00	21.387.500,00	(5.312.500,00)	(19,90)	
5.2.2.10.14	Belanja Sewa Karpet/Tikar/Terpal	215.640.000,00	211.050.000,00	(4.590.000,00)	(2,13)	
5.2.2.10.15	Belanja Sewa Alat Pendingin	193.864.000,00	183.864.000,00	(10.000.000,00)	(5,16)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.570.407.656,00	24.473.921.056,00	(9.096.486.600,00)	(27,10)	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	232.358.000,00	1.085.738.000,00	853.380.000,00	367,27	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.237.579.500,00	18.829.481.400,00	(9.408.098.100,00)	(33,32)	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.411.703.500,00	1.390.975.000,00	(20.728.500,00)	(1,47)	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan	1.350.751.500,00	829.711.500,00	(521.040.000,00)	(38,57)	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pasien	2.338.015.156,00	2.338.015.156,00	0,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	665.250.000,00	444.750.000,00	(220.500.000,00)	(33,15)	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	216.750.000,00	216.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	147.750.000,00	26.250.000,00	(121.500.000,00)	(82,23)	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	243.750.000,00	144.750.000,00	(99.000.000,00)	(40,62)	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	979.839.000,00	783.829.000,00	(196.010.000,00)	(20,00)	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	979.839.000,00	783.829.000,00	(196.010.000,00)	(20,00)	
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	1.826.199.400,00	864.719.600,00	(961.479.800,00)	(52,65)	
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	97.000.000,00	115.000.000,00	18.000.000,00	18,56	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	478.650.000,00	188.700.000,00	(289.950.000,00)	(60,58)	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.244.549.400,00	555.019.600,00	(689.529.800,00)	(55,40)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.667.086.004,50	30.971.206.497,00	(12.695.879.507,50)	(29,07)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.138.817.130,00	8.133.560.791,00	(5.256.339,00)	(0,06)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.278.268.874,50	22.787.645.706,00	(12.490.623.168,50)	(35,41)	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	3.123.934.000,00	2.410.650.000,00	(713.284.000,00)	(22,83)	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.943.634.000,00	2.380.100.000,00	(563.534.000,00)	(19,14)	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	180.300.000,00	30.550.000,00	(149.750.000,00)	(83,06)	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.723.896.837,00	3.395.614.437,00	(1.328.282.400,00)	(28,12)	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	203.200.000,00	203.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	579.089.300,00	606.583.900,00	27.494.600,00	4,75	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.866.607.537,00	2.511.404.537,00	(1.355.203.000,00)	(35,05)	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon/Air	2.000.000,00	1.426.000,00	(574.000,00)	(28,70)	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.795.138.500,00	2.886.839.500,00	(908.299.000,00)	(23,93)	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	655.377.500,00	310.377.500,00	(345.000.000,00)	(52,64)	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.989.761.000,00	2.471.462.000,00	(518.299.000,00)	(17,34)	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	150.000.000,00	105.000.000,00	(45.000.000,00)	(30,00)	
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	47.513.034.900,00	49.279.737.900,00	1.766.703.000,00	3,72	
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	47.513.034.900,00	49.279.737.900,00	1.766.703.000,00	3,72	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.505.693.500,00	104.935.312.420,00	(16.570.381.080,00)	(13,64)	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	45.081.337.000,00	42.407.225.620,00	(2.674.111.380,00)	(5,93)	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	76.424.356.500,00	62.528.086.800,00	(13.896.269.700,00)	(18,18)	
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Peralatan / Perlengkapan Kantor	695.077.200,00	582.316.200,00	(112.761.000,00)	(16,22)	
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll)	157.331.400,00	111.985.900,00	(45.345.500,00)	(28,82)	
5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Papan Informasi (Pengumuman, Data, dll)	210.621.400,00	169.550.000,00	(41.071.400,00)	(19,50)	
5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Mesin Hitung, Mesin Ketik, Kalkulator, dll	7.101.600,00	6.805.300,00	(296.300,00)	(4,17)	
5 . 2 . 2 . 28 . 04	Belanja Meubelair	5.965.000,00	5.965.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.28.05	Belanja Peralatan Evakuasi Bencana	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.28.06	Belanja Sentolop/Senter	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.28.08	Belanja Peralatan Bangunan, Pertanian, Perkebunan	222.841.500,00	216.807.500,00	(6.034.000,00)	(2,71)	
5.2.2.28.09	Belanja Kelengkapan dan Peralatan Kesehatan	79.166.300,00	59.152.500,00	(20.013.800,00)	(25,28)	
5.2.2.29	Belanja Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga	487.856.900,00	365.513.900,00	(122.343.000,00)	(25,08)	
5.2.2.29.01	Belanja Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga	487.856.900,00	365.513.900,00	(122.343.000,00)	(25,08)	
5.2.2.31	Belanja Sewa Tanah	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.31.01	Belanja Sewa Tanah	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.32	Belanja Tas Khusus Petugas Lapangan	200.000.000,00	231.500.000,00	31.500.000,00	15,75	
5.2.2.32.01	Belanja Tas Khusus Petugas Penyuluh/Lapangan	200.000.000,00	231.500.000,00	31.500.000,00	15,75	
5.2.2.33	Belanja Jasa Pihak Ketiga	73.631.315.772,00	70.171.970.274,00	(3.459.345.498,00)	(4,70)	
5.2.2.33.01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.267.374.000,00	9.147.999.000,00	(4.119.375.000,00)	(31,05)	
5.2.2.33.02	Belanja Dekorasi	2.978.230.800,00	2.222.826.500,00	(755.404.300,00)	(25,36)	
5.2.2.33.03	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	57.385.710.972,00	58.801.144.774,00	1.415.433.802,00	2,47	
5.2.2.34	Belanja Penanggulangan Bencana	623.175.000,00	6.623.175.000,00	6.000.000.000,00	962,81	
5.2.2.34.01	Belanja Penanganan Bencana	623.175.000,00	6.623.175.000,00	6.000.000.000,00	962,81	
5.2.2.35	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis Non PNS	1.095.848.300,00	240.000.000,00	(855.848.300,00)	(78,10)	
5.2.2.35.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan/ Sosialisasi/ Bimbingan Teknis	1.095.848.300,00	240.000.000,00	(855.848.300,00)	(78,10)	
5.2.2.36	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.540.900.000,00	7.677.073.500,00	(6.863.826.500,00)	(47,20)	
5.2.2.36.01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	54.250.000,00	26.750.000,00	(27.500.000,00)	(50,69)	
5.2.2.36.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat	14.486.650.000,00	7.650.323.500,00	(6.836.326.500,00)	(47,19)	
5.2.2.37	Belanja Jasa Profesi	15.421.672.000,00	11.025.605.000,00	(4.396.067.000,00)	(28,51)	
5.2.2.37.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	15.421.672.000,00	11.025.605.000,00	(4.396.067.000,00)	(28,51)	
5.2.2.39	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	74.565.581.700,00	74.565.581.700,00	0,00	0,00	
5.2.2.39.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	74.565.581.700,00	74.565.581.700,00	0,00	0,00	
5.2.2.41	Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13.039.271.240,00	5.961.010.240,00	(7.078.261.000,00)	(54,28)	
5.2.2.41.01	Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13.039.271.240,00	5.961.010.240,00	(7.078.261.000,00)	(54,28)	
5.2.3	Belanja Modal	295.658.349.847,89	243.898.982.628,89	(51.759.367.219,00)	(17,51)	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	802.089.500,00	0,00	(802.089.500,00)	(100,00)	
5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	802.089.500,00	0,00	(802.089.500,00)	(100,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.400.727.500,00	100.000.000,00	(1.300.727.500,00)	(92,86)	
5.2.3.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	450.727.500,00	0,00	(450.727.500,00)	(100,00)	
5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	850.000.000,00	0,00	(850.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	157.591.700,00	7.591.700,00	(150.000.000,00)	(95,18)	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	7.591.700,00	7.591.700,00	0,00	0,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.814.545.600,00	3.924.015.600,00	(890.530.000,00)	(18,50)	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.306.975.000,00	1.251.445.000,00	(55.530.000,00)	(4,25)	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	835.000.000,00	0,00	(835.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.665.550.000,00	1.665.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	877.020.600,00	877.020.600,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	6.940.000,00	12.974.000,00	6.034.000,00	86,95	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	6.940.000,00	12.974.000,00	6.034.000,00	86,95	
5.2.3.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.20.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	94.350.000,00	19.350.000,00	(75.000.000,00)	(79,49)	
5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	79.350.000,00	4.350.000,00	(75.000.000,00)	(94,52)	
5.2.3.22.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
5.2.3.23.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	39.376.600,00	19.376.600,00	(20.000.000,00)	(50,79)	
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	16.076.600,00	16.076.600,00	0,00	0,00	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	21.200.000,00	1.200.000,00	(20.000.000,00)	(94,34)	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	7.545.000,00	162.400.000,00	154.855.000,00	2.052,42	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00	
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	7.545.000,00	0,00	(7.545.000,00)	(100,00)	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.438.298.358,00	4.430.416.900,00	(1.007.881.458,00)	(18,53)	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	717.023.500,00	449.346.400,00	(267.677.100,00)	(37,33)	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.721.274.858,00	3.981.070.500,00	(740.204.358,00)	(15,68)	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.874.398.400,00	4.145.883.045,00	271.484.645,00	7,01	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.959.088.500,00	1.839.064.765,00	(120.023.735,00)	(6,13)	
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	5.250.000,00	1.050.000,00	(4.200.000,00)	(80,00)	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	166.133.600,00	152.133.600,00	(14.000.000,00)	(8,43)	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	648.402.400,00	1.070.475.700,00	422.073.300,00	65,09	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	41.069.100,00	24.690.600,00	(16.378.500,00)	(39,88)	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	849.772.300,00	858.535.880,00	8.763.580,00	1,03	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	204.682.500,00	199.932.500,00	(4.750.000,00)	(2,32)	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.434.259.200,00	33.375.554.800,00	25.941.295.600,00	348,94	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.030.270.500,00	25.289.904.200,00	20.259.633.700,00	402,75	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	66.780.000,00	66.780.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.934.337.000,00	3.323.073.900,00	1.388.736.900,00	71,79	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	386.371.700,00	4.679.296.700,00	4.292.925.000,00	1.111,09	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	317.904.900,00	87.029.900,00	(230.875.000,00)	(72,62)	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	40.750.000,00	20.800.000,00	(19.950.000,00)	(48,96)	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	26.250.000,00	0,00	(26.250.000,00)	(100,00)	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	25.862.500,00	22.762.500,00	(3.100.000,00)	(11,99)	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	127.150.000,00	18.575.000,00	(108.575.000,00)	(85,39)	
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	49.000.000,00	0,00	(49.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	48.892.400,00	24.892.400,00	(24.000.000,00)	(49,09)	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.029.110.150,00	2.460.130.150,00	1.431.020.000,00	139,05	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	806.848.400,00	2.083.318.400,00	1.276.470.000,00	158,20	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	179.061.750,00	356.811.750,00	177.750.000,00	99,27	
5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	319.375.000,00	283.875.000,00	(35.500.000,00)	(11,12)	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	300.375.000,00	267.875.000,00	(32.500.000,00)	(10,82)	
5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	9.853.600,00	0,00	(9.853.600,00)	(100,00)	
5.2.3.33.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW	9.853.600,00	0,00	(9.853.600,00)	(100,00)	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	24.947.128.931,00	25.809.397.970,81	862.269.039,81	3,46	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	7.747.433.171,00	6.461.962.910,81	(1.285.470.260,19)	(16,59)	
5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	4.015.808.360,00	4.001.138.360,00	(14.670.000,00)	(0,37)	
5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	1.217.500.000,00	1.173.500.000,00	(44.000.000,00)	(3,61)	
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	4.418.000,00	561.900.000,00	557.482.000,00	12.618,42	
5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	2.888.952.000,00	2.657.552.000,00	(231.400.000,00)	(8,01)	
5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.691.548.000,00	1.873.988.300,00	182.440.300,00	10,79	
5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	3.769.814.400,00	5.000.414.400,00	1.230.600.000,00	32,64	
5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	720.500.000,00	1.163.892.000,00	443.392.000,00	61,54	
5.2.3.34.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	16.500.000,00	13.500.000,00	(3.000.000,00)	(18,18)	
5.2.3.34.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	831.050.000,00	831.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	1.030.000.000,00	989.000.000,00	(41.000.000,00)	(3,98)	
5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.013.605.000,00	1.081.500.000,00	67.895.000,00	6,70	
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	81.500.000,00	0,00	(81.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	69.500.000,00	0,00	(69.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.35.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.458.932.070,00	1.556.264.135,00	97.332.065,00	6,67	
5.2.3.36.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	0,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	
5.2.3.36.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	96.400.000,00	96.400.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	135.456.200,00	121.456.200,00	(14.000.000,00)	(10,34)	
5.2.3.36.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	56.875.870,00	28.707.935,00	(28.167.935,00)	(49,53)	
5.2.3.36.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	1.100.000.000,00	867.000.000,00	(233.000.000,00)	(21,18)	
5.2.3.36.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	7.500.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	(26,67)	
5.2.3.36.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	
5.2.3.36.55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	0,00	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	
5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	23.300.000,00	15.800.000,00	(7.500.000,00)	(32,19)	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	6.111.219.750,00	2.209.974.000,00	(3.901.245.750,00)	(63,84)	
5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	38.220.000,00	38.220.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	118.965.000,00	120.500.000,00	1.535.000,00	1,29	
5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	194.332.000,00	194.332.000,00	0,00	
5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	1.141.700.000,00	1.057.740.000,00	(83.960.000,00)	(7,35)	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	4.812.334.750,00	799.182.000,00	(4.013.152.750,00)	(83,39)	
5.2.3.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
5.2.3.39.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting and Scientific	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.42.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	59.020.850,00	52.520.850,00	(6.500.000,00)	(11,01)	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	54.520.850,00	48.020.850,00	(6.500.000,00)	(11,92)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.700.260.453,81	69.786.112.680,00	(10.914.147.773,81)	(13,52)	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	25.786.403.043,81	19.595.254.320,00	(6.191.148.723,81)	(24,01)	
5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	3.437.513.000,00	3.299.013.000,00	(138.500.000,00)	(4,03)	
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	20.394.425.000,00	20.394.425.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	9.976.000,00	(190.024.000,00)	(95,01)	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.858.256.250,00	19.417.933.600,00	(440.322.650,00)	(2,22)	
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.800.382.000,00	0,00	(3.800.382.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	53.990.000,00	0,00	(53.990.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	2.550.000.000,00	2.523.031.600,00	(26.968.400,00)	(1,06)	
5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	3.067.558.000,00	3.160.133.000,00	92.575.000,00	3,02	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.351.733.160,00	1.186.346.160,00	(165.387.000,00)	(12,24)	
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.241.158.000,00	3.224.315.800,00	(1.016.842.200,00)	(23,98)	
5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	492.000.000,00	212.000.000,00	(280.000.000,00)	(56,91)	
5 . 2 . 3 . 50 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	528.027.000,00	467.859.800,00	(60.167.200,00)	(11,39)	
5 . 2 . 3 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.686.131.000,00	2.009.456.000,00	(676.675.000,00)	(25,19)	
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	9.904.617.000,00	9.705.700.000,00	(198.917.000,00)	(2,01)	
5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	9.904.617.000,00	9.705.700.000,00	(198.917.000,00)	(2,01)	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	445.828.000,00	445.828.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	445.828.000,00	445.828.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.069.785.995,08	27.714.732.273,08	(52.355.053.722,00)	(65,39)	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	80.059.781.222,00	27.704.727.500,00	(52.355.053.722,00)	(65,39)	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	10.004.773,08	10.004.773,08	0,00	0,00	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	27.688.169.000,00	23.171.082.400,00	(4.517.086.600,00)	(16,31)	
5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	881.111.000,00	737.611.000,00	(143.500.000,00)	(16,29)	
5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	24.890.058.000,00	20.516.471.400,00	(4.373.586.600,00)	(17,57)	
5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	1.727.000.000,00	1.727.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	37.168.590,00	37.156.625,00	(11.965,00)	(0,03)	
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	37.168.590,00	37.156.625,00	(11.965,00)	(0,03)	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	2.731.585.200,00	577.930.200,00	(2.153.655.000,00)	(78,84)	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	2.731.585.200,00	577.930.200,00	(2.153.655.000,00)	(78,84)	
5.2.3.80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.80.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.197.446.200,00	2.066.237.100,00	(131.209.100,00)	(5,97)	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.999.896.200,00	1.982.462.100,00	(17.434.100,00)	(0,87)	
5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	9.950.000,00	4.975.000,00	(4.975.000,00)	(50,00)	
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	14.400.000,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(50,00)	
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	64.850.000,00	17.425.000,00	(47.425.000,00)	(73,13)	
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	22.400.000,00	11.200.000,00	(11.200.000,00)	(50,00)	
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	43.950.000,00	21.975.000,00	(21.975.000,00)	(50,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	21.600.000,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(50,00)	
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	10.400.000,00	5.200.000,00	(5.200.000,00)	(50,00)	
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	361.000.000,00	280.000.000,00	(81.000.000,00)	(22,44)	
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.85.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.85.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Aset Lainnya	1.173.045.900,00	942.117.500,00	(230.928.400,00)	(19,69)	
5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Software	1.063.045.900,00	772.117.500,00	(290.928.400,00)	(27,37)	
5.2.3.90.02	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Website	110.000.000,00	170.000.000,00	60.000.000,00	54,55	
5.2.3.93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	9.445.448.300,00	10.045.448.300,00	600.000.000,00	6,35	
5.2.3.93.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	9.445.448.300,00	10.045.448.300,00	600.000.000,00	6,35	
5.2.3.94	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	3.683.970.000,00	3.083.970.000,00	(600.000.000,00)	(16,29)	
5.2.3.94.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	3.683.970.000,00	3.083.970.000,00	(600.000.000,00)	(16,29)	
5.2.3.95	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	979.000.000,00	979.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.95.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	979.000.000,00	979.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.98	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	4.440.586.000,00	6.484.486.100,00	2.043.900.100,00	46,03	
5.2.3.98.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	4.440.586.000,00	6.484.486.100,00	2.043.900.100,00	46,03	
5.2.3.00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	8.996.379.100,00	6.306.176.000,00	(2.690.203.100,00)	(29,90)	
5.2.3.00.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	8.996.379.100,00	6.306.176.000,00	(2.690.203.100,00)	(29,90)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(140.959.965.010,24)	(140.959.965.010,24)	0,00	0,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.03	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BONDOWOSO, 24 JULI 2020

BUPATI BONDOWOSO


SALWA ARIFIN



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
PENJABARAN PERGESERAN APBD ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 70 TAHUN 2019
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.823.402.917.365,00	1.698.604.265.365,00	(124.798.652.000,00)	(6,84)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN	1.431.791.004.000,00	1.261.415.794.000,00	(170.375.210.000,00)	(11,90)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.684.271.000,00	74.787.690.000,00	(4.896.581.000,00)	(6,14)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	48.286.310.000,00	54.395.858.000,00	6.109.548.000,00	12,65	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.759.126.000,00	4.415.027.000,00	(1.344.099.000,00)	(23,34)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	12.113.081.000,00	14.177.955.000,00	2.064.874.000,00	17,05	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	1.372.392.000,00	1.135.544.000,00	(236.848.000,00)	(17,26)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	1.526.940.000,00	1.537.811.000,00	10.871.000,00	0,71	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	27.514.771.000,00	33.129.521.000,00	5.614.750.000,00	20,41	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	31.397.961.000,00	20.391.832.000,00	(11.006.129.000,00)	(35,05)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	423.652.000,00	514.970.000,00	91.318.000,00	21,55	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	333.605.000,00	315.387.000,00	(18.218.000,00)	(5,46)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	1.418.361.000,00	915.571.000,00	182,10	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	26.517.933.000,00	16.122.415.000,00	(10.395.518.000,00)	(39,20)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	3.402.181.000,00	1.750.250.000,00	(1.651.931.000,00)	(48,56)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	217.800.000,00	270.449.000,00	52.649.000,00	24,17	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2	Dana Alokasi Umum	956.016.610.000,00	862.433.102.000,00	(93.583.508.000,00)	(9,79)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	956.016.610.000,00	862.433.102.000,00	(93.583.508.000,00)	(9,79)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	956.016.610.000,00	862.433.102.000,00	(93.583.508.000,00)	(9,79)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus	396.090.123.000,00	324.195.002.000,00	(71.895.121.000,00)	(18,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	108.218.004.000,00	72.222.372.000,00	(35.995.632.000,00)	(33,26)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	31.085.752.000,00	31.085.752.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	31.750.405.000,00	0,00	(31.750.405.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	4.929.902.000,00	749.902.000,00	(4.180.000.000,00)	(84,79)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.168.000.000,00	1.168.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.373.294.000,00	3.373.294.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.20	DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar	3.664.746.000,00	3.664.746.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.21	DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan	29.095.847.000,00	29.095.847.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.23	DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Farmasi	3.084.831.000,00	3.084.831.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.31	DAK Bidang Sosial	65.227.000,00	0,00	(65.227.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi	28.453.227.000,00	21.023.091.000,00	(7.430.136.000,00)	(26,11)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.05.01	DAK Afirmasi Bidang Infrastruktur Air Minum	3.880.000.000,00	0,00	(3.880.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.05.02	DAK Afirmasi Bidang Infrastruktur Sanitasi	6.160.000.000,00	2.968.000.000,00	(3.192.000.000,00)	(51,82)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.05.05	DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan	4.398.136.000,00	4.040.000.000,00	(358.136.000,00)	(8,14)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.05.07	DAK Afirmasi Bidang Pendidikan	2.530.000.000,00	2.530.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.05.08	DAK Afirmasi Bidang Kesehatan	11.485.091.000,00	11.485.091.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	220.258.277.000,00	211.391.236.000,00	(8.867.041.000,00)	(4,03)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.01	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	23.904.000.000,00	22.644.000.000,00	(1.260.000.000,00)	(5,27)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.02	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	19.751.830.000,00	25.661.830.000,00	5.910.000.000,00	29,92	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.03	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	4.031.166.000,00	4.031.166.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.04	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	6.308.302.000,00	6.241.832.000,00	(66.470.000,00)	(1,05)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.05	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	136.911.562.000,00	126.090.299.000,00	(10.821.263.000,00)	(7,90)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.06	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.154.000.000,00	814.388.000,00	(1.339.612.000,00)	(62,19)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.09	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	2.831.161.000,00	2.831.161.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.10	DAK Non Fisik Data Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.065.903.000,00	2.913.461.000,00	(152.442.000,00)	(4,97)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.12	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	19.868.500.000,00	19.172.200.000,00	(696.300.000,00)	(3,50)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.13	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	491.010.000,00	491.010.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.14	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan	885.004.000,00	444.050.000,00	(440.954.000,00)	(49,83)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.06.15	DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000,00	55.839.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.07	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	39.160.615.000,00	19.558.303.000,00	(19.602.312.000,00)	(50,06)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.07.01	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	4.120.000.000,00	1.720.000.000,00	(2.400.000.000,00)	(58,25)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.07.02	DAK Penugasan Bidang Jalan	12.795.814.000,00	0,00	(12.795.814.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.07.03	DAK Penugasan Bidang Pasar	2.850.382.000,00	0,00	(2.850.382.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.07.04	DAK Penugasan Bidang Irigasi	4.674.605.000,00	4.674.605.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.07.05	DAK Penugasan Bidang Air Minum	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.07.07	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	7.842.384.000,00	7.842.384.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.07.08	DAK Penugasan Bidang Pertanian	3.176.937.000,00	2.305.607.000,00	(871.330.000,00)	(27,43)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.07.09	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.363.962.000,00	1.164.962.000,00	(199.000.000,00)	(14,59)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.07.10	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	1.586.531.000,00	1.100.745.000,00	(485.786.000,00)	(30,62)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	391.611.913.365,00	437.188.471.365,00	45.576.558.000,00	11,64	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1	Pendapatan Hibah	60.950.000.000,00	62.070.400.000,00	1.120.400.000,00	1,84	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	60.950.000.000,00	62.070.400.000,00	1.120.400.000,00	1,84	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	60.950.000.000,00	62.070.400.000,00	1.120.400.000,00	1,84	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	83.107.160.365,00	83.107.160.365,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	83.107.160.365,00	83.107.160.365,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.275.619.737,00	20.275.619.737,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.061.989.474,00	10.061.989.474,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.170.605.503,00	20.170.605.503,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	258.234.649,00	258.234.649,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	32.340.711.002,00	32.340.711.002,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	247.554.753.000,00	256.120.568.000,00	8.565.815.000,00	3,46	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	247.554.753.000,00	256.120.568.000,00	8.565.815.000,00	3,46	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	9.079.082.000,00	19.903.560.000,00	10.824.478.000,00	119,22	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.01.06	Dana Desa	238.475.671.000,00	236.217.008.000,00	(2.258.663.000,00)	(0,95)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	35.890.343.000,00	35.890.343.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	35.890.343.000,00	35.890.343.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	35.890.343.000,00	35.890.343.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5	BELANJA	446.329.236.040,89	414.421.033.365,58	(31.908.202.675,31)	(7,15)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	446.329.236.040,89	414.421.033.365,58	(31.908.202.675,31)	(7,15)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00	Non Kegiatan	446.329.236.040,89	414.421.033.365,58	(31.908.202.675,31)	(7,15)	<i>Sumber Dana :</i>
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.3	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.183.163.800,00	1.183.163.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4	Belanja Hibah	73.259.198.600,00	71.389.098.600,00	(1.870.100.000,00)	(2,55)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	73.259.198.600,00	71.389.098.600,00	(1.870.100.000,00)	(2,55)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	73.259.198.600,00	71.389.098.600,00	(1.870.100.000,00)	(2,55)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.983.600.000,00	4.105.377.000,00	1.121.777.000,00	37,60	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	505.100.000,00	1.651.877.000,00	1.146.777.000,00	227,04	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada	505.100.000,00	1.651.877.000,00	1.146.777.000,00	227,04	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Masyarakat	2.392.000.000,00	2.367.000.000,00	(25.000.000,00)	(1,05)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga	2.392.000.000,00	2.367.000.000,00	(25.000.000,00)	(1,05)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.910.195.040,89	5.117.840.465,58	(1.792.354.575,31)	(25,94)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.065.704.443,39	2.880.578.844,13	(1.185.125.599,26)	(29,15)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.065.704.443,39	2.880.578.844,13	(1.185.125.599,26)	(29,15)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.844.490.597,50	2.237.261.621,45	(607.228.976,05)	(21,35)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.844.490.597,50	2.237.261.621,45	(607.228.976,05)	(21,35)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	359.893.078.600,00	330.007.251.200,00	(29.885.827.400,00)	(8,30)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.07	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	121.417.407.600,00	93.790.243.200,00	(27.627.164.400,00)	(22,75)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.07.01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	121.417.407.600,00	93.790.243.200,00	(27.627.164.400,00)	(22,75)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.08	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	238.475.671.000,00	236.217.008.000,00	(2.258.663.000,00)	(0,95)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.08.01	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	238.475.671.000,00	236.217.008.000,00	(2.258.663.000,00)	(0,95)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.100.000.000,00	2.618.302.300,00	518.302.300,00	24,68	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	2.100.000.000,00	2.618.302.300,00	518.302.300,00	24,68	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.100.000.000,00	2.618.302.300,00	518.302.300,00	24,68	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.377.073.681.324,11	1.284.183.231.999,42	(92.890.449.324,69)	(6,75)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.5.01.03	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	140.959.965.010,24	140.959.965.010,24	0,00	0,00	

BONDOWOSO, 24 JULI 2020

BUPATI BONDOWOSO



SALWA ARIFIN